

## WAWASAN KEBANGSAAN: NILAI-NILAI PERSAHABATAN DAN HIDUP HARMONIS

Oleh:

**IMAM SUYITNO**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

e-mail: [imamsuyitno@unm.ac.id](mailto:imamsuyitno@unm.ac.id)

**ABSTRAK:** Memasuki milenium ketiga Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia atau “*third largest democracy in the world*”, setelah India dan Amerika Serikat. Perubahan Indonesia menuju demokrasi kelihatan tidak dapat dielakkan’ terbukti dengan adanya liberalisasi dan demokratisasi mengikuti kecenderungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional secara keseluruhan. Dan Indonesia pada akhirnya mengikuti apa yang disebut banyak ahli sebagai *third wave democracy*. Pada saat yang bersamaan terjadi pula arus balik, dimana harus di akui bahwa pertumbuhan demokrasi atau transisi Indonesia secara damai menuju demokrasi, juga menimbulkan banyak kegamangan dan kecemasan. Jika demokrasi adalah *peaceful resolution on conflict*, orang menyaksikan semakin meningkatnya kecenderungan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, seperti penggunaan *mob politics, money politics* dan cara-cara un demokratis lainnya. Perkembangan seperti ini jelas merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi. Sebagaimana di kemukakan Sorensen (1993), konflik domestic yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan dan pad gilirannya di ikuti dengan kekerasan dan anarki sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokratis. Apalagi meminjam istilah Hefner, untuk menumbuhkan keadaban demokratis atau *Democratic Civiliy* (Hefner, 1998). Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia di masa transisi menuju demokrasi sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elite politik yang pada gilirannya berimbas pada lapisan masyarakat akar rumput. Jika salah satu esensi demokrasi dan polotik adalah *art of compromise* dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap mau menang sendiri pada kalangan elite politik dan massa, yang bukan tidak jarang berujung dengan kekerasan dan anarki. Anarkisme itu bertambah akut dengan tumbuhnya *law enforcement* dan merusotnya peranan dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum. Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi masalah yang serius menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, persoalan ini sesungguhnya terkait dengan jati diri bangsa. Jadi persoalan yang mendesak bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana jati diri bangsa Indonesia mampu bersaing di dunia global. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 mencanangkan program “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional. Setelah dicanangkan program ini, beberapa Direktorat Jenderal dengan Direktorat-direktorat yang ada segera menindaklanjuti dengan menyusun rambu-rambu penerapan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Bahkan kementerian-kementerian lainpun tidak ketinggalan juga diberi tugas untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter di lingkungannya.

**KATA KUNCI:** *Wawasan Kebangsaan, Nilai Persahabatan, Hidup Harmonis*

**ABSTRACT:** Entering the third millennium Indonesia touted as one of the largest democracies in the world or the "third Reviews largest democracy in the world", after India and the United States. Indonesian change toward democracy seemed inevitable 'evidenced by the tendency of liberalization and democratization following the dramatic growth of democracy at the international level as a whole. And Indonesia in the end follow what is called many experts as the third wave democracy. At the same time there is also a reverse flow, which should be recognized that the growth of democracy or Indonesia as a peaceful transition to democracy, it also raises a lot of uncertainty and anxiety. If demokrasi is on peaceful conflict resolution, people witnessed the increasing tendency of conflict resolution melalui ways undemocratic, such as the use of mob politics, money politics and un democratic ways others. Developments such as this clearly is a phenomenon that is not conducive to the Indonesia's transition to democracy. As pointed out Sorensen (1993), domestic conflicts that occur at various levels and segments of society, which is sourced from and the resulting deterioration of power and authority pad turn followed by violence and anarchy in no way conducive to the creation and development of a democratic political culture. Moreover, to borrow a phrase Hefner, to foster democratic civilization or Democratic Civiliy (Hefner, 1998). The increasing tendency to use undemocratic means and political violence in Indonesia in the period of transition to democracy largely sourced from the conflict between the political elite which in turn impact on the grassroots levels of society. If one of the essence of democracy and polotik is art of compromise and respect for the differences in political attitudes, people actually witnessed ever increasing bossy attitude in the political elite and the masses, which is not infrequently lead to violence and anarchy. Anarchism had grown acute with the growth of law enforcement and the role and function merusotnya enforcement agencies hukum. Fenomena above show that there has been a serious problem concerning the life of the nation, the issue is actually related to national identity. So the issue is urgent for Indonesia is how the identity of Indonesia can compete in the global world. The Government through the Ministry of National Education in 2010 launched a program "Culture and National Character Education" as a national movement. Having launched the program, some of the Directorate General of the Directorates were no immediate follow up by drafting guidelines application Culture and National Character Education. Even ministries lainpun not miss also given the task to develop and implement character education in their environment.

**KEYWORDS:** *Insights nationalities, value friendship, Living in Harmony*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan beberapa kajian yang ada, jumlah negara yang secara formal menganut demokrasi meningkat drastis pada dasawarsa 1990an ; jumlah meningkat dari 76 negara (46,1 persen ) dari jumlah seluruh negara di dunia menjadi 117 (63,1 persen). Tetapi di samping perkembangan yang menggembirakan ini, kekawatiran juga mulai berkembang melihat

kecenderungan mandeknya demokrasi atau ketidak pastian transisi menuju demokrasi, seperti yang terjadi di Eropa timur, Balkan dan kini juga Indonesia.

Tetapi, pada saat yang sama harus di akui bahwa pertumbuhan demokrasi atau transisi Indonesia secara damai menuju demokrasi, juga menimbulkan banyak kegamangan dan kecemasan. Jika demokrasi adalah *peaceful resolution on conflict*, orang menyaksikan semakin meningkatnya kecenderungan

penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, seperti penggunaan *mob politics*, *money politics* dan cara-cara un demokratis lainnya. Perkembangan seperti ini jelas merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi. Sebagaimana di kemukakan Sorensen (1993), konflik domestic yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan dan pad gilirannya di ikuti dengan kekerasan dan anarki sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokratis. Apalagi – meminjam istilah Hefner- untuk menumbuhkan keadaban demokratis (*Democratic Civiliy*) (1998).

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi masalah yang serius menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, persoalan ini sesungguhnya terkait dengan jati diri bangsa. Jadi persoalan yang mendesak bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana jati diri bangsa Indonesia mampu bersaing di dunia global. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 mencanangkan program “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional. Setelah dicanangkan program ini, beberapa Direktorat Jenderal dengan Direktorat-direktorat yang ada segera menindaklanjuti dengan menyusun rambu-rambu penerapan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Bahkan kementerian-kementerian lainpun tidak ketinggalan juga diberi tugas untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter di lingkungannya.

Demam pendidikan karakter terjadi di mana-mana, selama tahun 2010 ini hampir setiap pertemuan ilmiah, seperti diskusi, sarasehan, dan seminar, baik seminar regional, nasional maupun

internasional mengambil tema tentang pendidikan karakter. Nampaknya program pendidikan karakter ini masih akan menjadi *main stream* di masa-masa berikutnya. Hal ini menunjukkan betapa urgensinya mengenai pendidikan karakter bagi warga bangsa ini, sehingga sangat tepat pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Mengapa pertlu pendidikan karakter, apa dan bagaimana pendidikan karakter, bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan pendidikan karakter? Beberapa pertanyaan inilah yang dicoba akan dijawab melalui tulisan singkat ini.

## **MENGAPA PERLU PENDIDIKAN KARAKTER**

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mantan kepala pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mengangkat isu tentang pendidikan karakter bangsa sebagai pilar pembangunan. Selanjutnya Presiden menyatakan bahwa: “Kita harus menjaga jati diri kita, keindonesiaan kita. Hal yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain di dunia adalah budaya kita, *way of life* kita dan keindonesiaan kita. Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah goyah. Keindonesiaan kita tercermin dalam sikap pluralisme atau kebhinekaan, kekeluargaan, kesatuan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan kemanusiaan. Hal-hal inilah yang harus kita jaga, kita pupuk, kita suburkan di hati sanubari kita dan di hati anak-anak kita”.

Pernyataan presiden tersebut mengingatkan kita semua kepada pesan Bung Karno, Presiden pertama RI. Bung Karno yang menggelorakan tema besar “*nation and character building*” pernah berpesan kepada kita bangsa Indonesia,

bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (.H. Soemarno Soedarsono, 2009: sampul). Pernyataan Bung Karno ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter demi tegak dan kokohnya jati diri bangsa agar mampu bersaing di dunia global.

Pandangan dan pernyataan dari dua pemimpin itu, cukuplah sudah untuk memberikan gambaran bahwa pendidikan karakter bangsa itu merupakan hal sangat fundamental dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sudah selayaknya kalau pendidikan atau pembangunan karakter bangsa ini secara konstitusional mendapatkan landasan yang kuat. Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila telah memberikan landasan yang begitu mendasar, kokoh dan komprehensif. Selanjutnya secara operasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (lih. UU RI No. 17 Tahun 2007), ditegaskan bahwa misi pertama pembangunan nasional adalah terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi ipteks.

Berikutnya di dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010) disebutkan bahwa (1) karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan sebagai

”kemudi” dan kekuatan, sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Dalam proses pembangunan karakter bangsa ini harus difokuskan pada tiga tataran besar: (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan NKRI, dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat (Udin S. Winataputra, 2010: 1)

Argumentasi tentang pentingnya pendidikan karakter dan perangkat lunak sebagai landasan dan rambu-rambu dalam pelaksanaan pendidikan karakter sudah tersedia. Bagaimana harus melaksanakan. Kegiatan melalui bidang pendidikan nampaknya merupakan wahana yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karakter bangsa. Secara khusus di dalam bidang pendidikan juga telah diberikan rambu-rambu dan arah yang jelas bagaimana membangun karakter dan kepribadian anak bangsa ini. Di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Inilah rumusan tujuan pendidikan yang sesungguhnya, tujuan pendidikan yang utuh dan sejati. Aspek-aspek yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan ini, baik yang terkait dengan tujuan eksistensial, kolektif maupun individual harus dicapai secara utuh

melalui proses pendidikan dalam berbagai jalur dan jenjang. Kalau hal ini dapat dilakukan, maka proses pencapaian tujuan pendidikan nasional sedang berlangsung dan berada pada jalur yang benar. Namun sayang dalam pelaksanaan pendidikan di lapangan, rumusan tujuan pendidikan nasional yang begitu komprehensif itu tidak sepenuhnya dipedomani. Secara formal sebenarnya telah muncul kesadaran bahwa misi utama pendidikan tidak sekedar membuat peserta didik pintar otaknya, tetapi juga berkarakter baik. Tetapi dalam kenyataannya penyelenggaraan pendidikan kita lebih pragmatis dan masih tetap menekankan pada penguasaan materi ajar.

Di lembaga pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan lebih banyak sebagai proses pengembangan ranah kognisi, dan membangun kecerdasan intelektual, sehingga pendidikan kita lebih bersifat intelektualistik, yang bisa bias tujuan. Sementara dari segi kualitas, pendidikan kita masih juga sering dipertanyakan, dengan tidak menutup mata sebagian di antara anak bangsa ini yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tetapi secara umum masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Berbagai upaya untuk memecahkan masalah di bidang pendidikan tersebut, terus dilakukan. Sebagai contoh adanya peningkatan anggaran pendidikan, pengembangan IT, ujian nasional (sekali pun ada pro dan kontra), sertifikasi pendidik/guru (yang masih juga menyisakan permasalahan besar), dan juga dilakukannya revisi atau penyempurnaan kurikulum dengan dikeluarkannya Permen no. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Permen no. 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang kemudian melahirkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Namun kenyataannya, berbagai upaya perbaikan itu belum membuahkan hasil yang signifikan, apalagi kalau dikaitkan arah tujuan pendidikan nasional untuk membentuk karakter individu dan masyarakat, serta bangsa Indonesia yang bermartabat, masih menghadapi kendala yang begitu kompleks. Harus diakui bahwa kita masih menghadapi kondisi kehidupan sosio kebangsaan yang memprihatinkan. Peristiwa politik tahun 1998 yang telah mengakhiri kekuasaan Orde Baru dengan berbagai euforianya ternyata masih menyisakan luka mendalam di berbagai aspek kehidupan.

Berbagai bentuk pelanggaran masih terus terjadi. Misalnya demokrasi yang “kebablasan” yang kadang melahirkan anarkhisme dan ketidaksabaran, tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM, perilaku amoral dan runtuhnya budi pekerti luhur, semau gue, tidak tertib, dan tidak disiplin, berbagai bentuk kenakalan remaja dan perkelahian antarpelajar, korupsi, perilaku pimpinan yang kadang berperilaku tidak pantas, ketidakjujuran dan budaya nerabas, rentannya kemandirian dan jati diri bangsa, masih menghiasi kehidupan bangsa kita (Sardiman AM, 2006).

Kemandirian dan jati diri inserta semangat kebangsaan kita turun tajam dan di mata masyarakat internasional seperti kita telah kehilangan karakter yang selama beratus-ratus tahun bahkan berabad-abad kita bangun. Pancasila yang merupakan dasar negara dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tidak aplikatif. Inilah potret sebagian dari kehidupan sosio-kebangsaan yang menjadikan keprihtinan kita semua. Menurut Thomas Lickona, (dikutip dari Sjamsi Pasandaran, 2010:3) berbagai permasalahan sosio kebangsaan itu merupakan pertanda kehancuran suatu bangsa.

Kondisi ini juga mendapat perhatian khusus oleh Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional. Menteri Pendidikan Nasional pernah mengatakan bahwa kehidupan kita ini kadang seperti permainan sirkus (Kedaulatan Rakyat, 3 Mei 2010: 1), yang menurut Presiden SBY sebagian masyarakat kita terlenda tragedi akhlak (Media Indonesia 11 Juli, 2010: 1). Itulah sebabnya sangatlah tepat kalau pemerintah mencanangkan dan melaksanakan pendidikan budaya dan karakter bangsa

## **KONSEPSI PENDIDIKAN KARAKTER**

Secara umum, karakter sering diidentikkan dengan temperamen, atau yang paling populer, karakter sering disamakan dengan kepribadian. Kepribadian dipandang sebagai ciri atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya di lingkungan keluarga saat masih kecil dan bawaan seseorang sejak lahir (Doni Koesoema A, 2007: 80). Dalam konteks mikro, karakter secara koheren akan memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang. Karakter merupakan ciri khas seseorang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Sedang secara makro, karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa sekelompok orang yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan norma-norma UUD 1945 (Udin S. Winataputra, 2010:3). Uraian ini menunjukkan bahwa karakter itu tidak semata-mata

pembawaan, tetapi memerlukan program pembinaan.

Oleh karena itu, pendidikan karakter yang dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti (lih. juga Darmiyati Zuchdi, 2008: 5) merupakan program yang sangat diperlukan untuk mengembangkan dan memantapkan kepribadian setiap anggota masyarakat dan bangsa.

Pendidikan karakter merupakan peluang bagi penyempurnaan diri manusia. Pendidikan karakter merupakan proses pendewasaan dan pematangan diri seseorang agar menjadi manusia seutuhnya, manusia yang berkarakter yang terlihat pada kehidupan moral dan kematangan pada setiap diri seseorang warga belajar, sehingga memahami kebaikan, mau berbuat baik dan berperilaku baik sebagai manifestasi dari pribadi yang baik (lih. Warsono, dalam Jumadi (edit), 2010: 35). Pendidikan karakter atau pendidikan moral merupakan proses pembinaan, pembudayaan dan pemanusiaan. Pendidikan karakter akan mengantarkan warga belajar dengan potensi yang dimilikinya dapat menjadi insan-insan yang beradab, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehambaan dan kekhalfahan.

Analog dengan pemahaman tersebut, maka pengembangan pendidikan karakter di sekolah, juga merupakan proses pembinaan, pemberian bimbingan dan fasilitasi kepada peserta didik agar menjadi insan dan generasi muda yang cerdas, terampil, mandiri, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa, sebagai manifestasi dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga serta olah rasa dan karsa yang telah disebut di muka. Kirsten Lewis (1996:8) menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya untuk mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi para

peserta didik. Oleh karena itu, institusi pendidikan atau sekolah harus menjadi lingkungan yang kondusif. Sekolah harus menjadi sebuah komunitas dan wahana persaudaraan tempat berkembangnya nilai-nilai kebaikan dan sarana pembiasaan yang baik. Dalam pengembangan pendidikan karakter, guru harus juga bekerja sama dengan keluarga atau orang tua/wali peserta didik. Bahkan menurut Cletus R. Bulach (2002: 80), guru dan orang tua perlu membuat kesepakatan tentang nilai-nilai utama apa yang perlu dibelajarkan misalnya: *respect for self, others, honesty; self-control/discipline*.

Dalam kaitan ini Thomas Lickona (2000: 48) menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik agar tercipta kehidupan yang harmonis di lingkungan sekolah, dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa nilai itu antara lain: kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai/menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan. Dalam konteks keindonesiaan, pendidikan karakter bangsa merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa (Indonesia) untuk melahirkan insan atau warga negara yang bermartabat dan berperadaban tinggi. Karakter bangsa adalah sebuah keunikan suatu komunitas yang mengandung perekat kultural bagi setiap warga negara. Karakter bangsa menyangkut perilaku yang mengandung *core values* dan nilai-nilai yang berakar pada filosofi Pancasila, dan dan norma UUD 1945 serta simbol-simbol keindonesiaan seperti: Sang Saka Merah Putih, semboyan Bhineka Tunggal Ika, lambang Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya (lih. ALPTKI, 2009: 3).

Esensi nilai-nilai keindonesiaan ini harus menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan karakter

bangsa. Namun harus diingat bahwa pendidikan karakter bangsa tidak hanya berurusan dengan transformasi dan internalisasi *core values* dan nilai-nilai keindonesiaan kepada peserta didik, tetapi pendidikan karakter bangsa juga merupakan proses usaha bersama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan individu, masyarakat dan bangsa yang mantap. Tujuan dari pendidikan dan pembangunan karakter bangsa itu adalah untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara, agar menjadi warga negara yang baik, mampu mewujudkan masyarakat bangsa atas dasar sila-sila Pancasila (lih. Kebijakan Nasional, 2010:5). Adapun sasarannya adalah (Kebijakan Nasional, 2010:5-6): (1) Lingkup Keluarga, merupakan wahana pembelajaran dan pembiasaan nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain di keluarga, sehingga melahirkan anggota keluarga yang berkarakter. (2) Lingkup satuan pendidikan, merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilaksanakan dengan, (a) pengintegrasian pada semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya sekolah, (c) melalui kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, (d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. (3) Lingkup pemerintahan, merupakan wahana pengembangan karakter bangsa melalui keteladanan penyelenggara negara, elit pemerintah dan elit politik. (4) Lingkup Masyarakat sipil, merupakan wahana pengembangan dan pendidikan karakter melalui keteladanan tokoh dan pemimpin masyarakat serta berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial. (5) Lingkup masyarakat politik, merupakan wahana untuk melibatkan warga negara dalam penyaluran aspirasi politik. (6) Lingkup

Dunia Usaha, merupakan wahana interaksi para pelaku sektor riil yang menopang bidang perekonomian nasional, yang ditandai misalnya menguatnya daya saing dan meningkatnya lapangan kerja (7) Lingkup media massa, merupakan fungsi dan sistem yang memberi pengaruh signifikan terhadap publik, terutama terkait dengan pengembangan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai jati diri bangsa. Media massa perlu bersifat selektif dalam pemberitaan dan program tayangannya.

Beberapa uraian tersebut memberi petunjuk bahwa karakter, baik dalam konteks mikro (karakter pada diri individu), maupun dalam arti makro (karakter bangsa), memerlukan proses menjadi, tumbuh dan berkembang, bukan sesuatu yang otomatis dan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, dalam pengembangan karakter seseorang atau karakter bangsa, perlu adanya rekayasa sosial (Zamroni, 2010: 1). Program pemerintah mengenai "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa", tersirat sebuah upaya rekayasa sosial untuk mewujudkan peserta didik dan generasi Indonesia yang ber-Ketuhanan YME, berkemanusiaan, berjiwa persatuan, berorientasi kerakyatan dan berkeadilan sosial, melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, demokratis dan bertanggung jawab, generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual serta keterampilan kinestetik

#### **MASALAH UTAMA BANGSA INDONESIA: ASPEK KEBANGSAAN DAN MULTIKULTURAL**

Membahas persoalan utama bangsa dapat dilakukan dengan bertitik tolak dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bab IX A,

Wilayah Negara, Pasal 25 A yang berbunyi " *Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang* ". Mengacu kepada pasal 25 A ini, selanjutnya dikatakan bahwa negara kepulauan merupakan karakteristik atau kekhasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berkaitan dengan kekhasan NKRI terdapat sebanyak tujuh cara pandang terhadapnya, yaitu berkaitan dengan aspek kedaulatan, aspek kebangsaan yang multikultural (terdapat 370 suku bangsa dan 67 bahasa induk), aspek tata ruang geografik, aspek rawan bencana, aspek pemerintahan, aspek tata ruang ekonomi, aspek pertahanan dan keamanan. Di wilayah NKRI terdapat sekitar 17.500 pulau, pantai sepanjang 81.000 km dan sebanyak 370 suku bangsa. Suku-suku bangsa ini tersebar di berbagai pulau yang tersebar membujur dari Sabang hingga Merauke. Dengan kondisi seperti ini NKRI dihadapkan kepada persoalan kebangsaan yang selalu harus dibangun, dan pada hal-hal yang berkaitan dengan multikulturalisme.

#### **Kebangsaan Indonesia**

Akar kata kebangsaan adalah bangsa, yang mempunyai banyak definisi. Di sini dikemukakan definisi tentang bangsa yang dikemukakan oleh Ernest Renan (Perancis), Otto Bauer (Jerman), Fratzel (Jerman), Hans Kohn (Jerman)'. Kemudian dari definisi-definisi tersebut berkembang pengertian bangsa dalam berbagai perspektif seperti etnik, kultural, politis, yang masing-masing dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bangsa dalam perspektif etnis: kelompok manusia yang berasal usul tunggal baik dalam arti keturunan maupun kewilayahan. (2) Bangsa dalam

perspektif kultural : sekelompok manusia yang menganut kebudayaan yang sama. (3) Bangsa dalam arti politis : merupakan kelompok manusia yang mendukung suatu organisasi kekuatan yang disebut negara tanpa menyelidiki asal usul keturunannya.

Setiap bangsa ini mempunyai tiga unsur aspirasi, yakni: (1) Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasionalisme sepenuhnya. (2) Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan. (3) Keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan gengsi.

Seperti yang telah disinggung di muka bahwa rakyat Indonesia bermukim di berbagai pulau di Indonesia. Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, pemerintah Hindia-Belanda menduduki hampir semua wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan yang lainnya. Ini berarti telah terjadi politik memecah belah rakyat, yang jauh dari rasa kebangsaan. Dengan kata lain suku-suku bangsa di Indonesia terkondisi untuk tidak mampu membangun kebangsaan Indonesia. Melihat kenyataan bahwa pemerintah Hindia-Belanda menerapkan politik memecah belah (*Divide et impera*), maka pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan Budi Utomo oleh Dr. Soetomo dkk yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan.

Sejalan dengan perjalanan waktu, terdapat berbagai pergerakan serupa untuk melawan pemerintah Hindia-Belanda, seperti *Indische Partai* yang dimotori oleh Douwes Dekker yang menekankan arti penting "*tanah air Indonesia*". Selain *Indische Partai*, masih ada pergerakan lain yang di rintis lebih awal melalui Sarekat Dagang Islam, dan berkembang menjadi Sarekat Islam yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto, yang

bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Dari sini muncul nasionalisme Indonesia yang sangat penting digunakan untuk membangun kebangsaan Indonesia, yang kemudian melahirkan *Sumpah Pemuda*.

Setelah melalui perjuangan yang panjang ratusan tahun, akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 dilakukan Sumpah Pemuda oleh para pemuda, yang isinya lahir suatu bangsa yang dinamakan bangsa Indonesia.

### **Multikulturalisme**

Multikulturalisme berkaitan dengan kebudayaan, yang mempunyai beberapa pengertian seperti berikut ini: (1) Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain. (2) Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Multikulturalisme di Indonesia terbentuk akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Multikulturalisme digunakan sebagai dasar pembentukan kebudayaan nasional.

### **Karakter Bangsa**

Dikatakan bahwa kebudayaan menyangkut seluruh cara hidup. Jika demikian halnya, budaya bangsa ini berkaitan sangat erat dengan Pancasila

yang telah bersifat final ditetapkan sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penegasan kembali dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ketetapan MPR No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Rakyat Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Berkenaan dengan Pancasila yang telah ditetapkan/disahkan sebagai dasar negara, hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia masuk ke dalam tiga asas, yaitu: (1) Asas Kebudayaan; Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan adat-istiadat dan kebudayaan. (2) Asas Religius; Toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. (3) Asas Kenegaraan; Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti sebagai asas kenegaraan.

Mengacu kepada hakekat Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia, ini berarti Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan pola perilaku atau karakter bangsa Indonesia. Atau dengan kata lain, karakter bangsa Indonesia dicerminkan oleh karakter yang terkandung di dalam: (1) *Ketuhanan Yang Maha Esa*, (2) *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, (3) *Persatuan Indonesia*, (4) *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*, (5) *Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia*.

Karakter bangsa merupakan karakter yang harus ada untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar

negara. Dari karakter bangsa ini harus dapat diturunkan untuk membangun karakter individu yang diterapkan di berbagai macam komunitas atas masyarakat, antara lain masyarakat akademik.

### **KARAKTER INDIVIDU DALAM PERSPEKTIF BUDAYA AKADEMIK**

Untuk melaksanakan budaya akademik dan juga kebebasan akademik, yang ruang lingkungannya seperti rumusannya diperlukan suatu karakter yang kuat untuk mewujudkannya. Karakter ini diturunkan dari karakter bangsa yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila.

Dalam perspektif karakter individu dengan menggunakan pendekatan psikologis, karakter bangsa yang terdapat dalam setiap sila ditempatkan dalam kerangka referensi *olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa*. Muatan dari keempat oleh tersebut dijabarkan seperti yang tercantum dalam Kebijakan Nasional, Pembangunan Karakter Bangsa, Tahun 2010-2025. Muatan karakter yang berasal dari olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa yang diturunkan dari setiap sila Pancasila, kemudian dipilih satu jenis karakter dari keempat oleh tersebut. Adapun berbagai macam jenis karakter dan karakter yang dipilih adalah sebagai berikut: (1) Karakter yang bersumber dari olah hati; Beriman dan bertakwa, *jujur*, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggungjawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. (2) Karakter yang bersumber dari olah pikir; *Cerdas*, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif. (3) Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestetika; Bersih dan sehat, sportif, *tangguh*, andal, berdaya

tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih/tangguh. (4) Karakter yang bersumber dari oleh rasa dan karsa; Kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, *peduli*, kosmolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

Dari jenis-jenis karakter yang terdapat dalam ranah oleh hati, oleh pikir, olah raga, olah rasa dan karsa, masing-masing diambil satu karakter sebagai nilai-nilai dasar karakter yang diberlakukan di lingkungan Dikti. Karakter yang dimaksud adalah : Jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Nilai-nilai Dasar Karakter ini jika akan diberlakukan di lingkungan kemahasiswaan penting untuk dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan Harkat Pendidikan.

## PENUTUP

Upaya untuk menyelenggarakan pendidikan karakter di lingkungan pendidikan tinggi yang bertumpu pada nilai-nilai dasar karakter, yaitu jujur, cerdas, tangguh, dan peduli akan dihadapkan pada persoalan utama, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan dalam tataran pola pikir dan pola tindak. Pola pikir masuk ke dalam ranah, yakni penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi harus mampu untuk memasukan unsur nilai-nilai dasar karakter ke dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Adapun pola tindaknya dapat dalam bentuk membangun sinergi antara dosen dan mahasiswa. Kesinergian antara dosen dan mahasiswa merupakan modal intelektualitas untuk mewujudkan keberhasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani (pengantar)*, Jakarta, Permata Media.
- ALPTKI, 2009. *Pemikiran tentang Pendidikan Karakter dalam Bingkai Utuh Sistem Pendidikan Nasional*, Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani*, Jakarta, Raja Grafindo Pusada
- Danim, Sudarwan, 2002, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung, Pustaka Setia.
- Direktorat Pendidikan menengah umum, Ditjen,. Dikdsmen, Depdiknas, 2004, *kurikulum 2004 SMA pedoman Khusus pengembangan silabus dan penilaian*, Jakarta.
- Fattah, Nanang. 2001, *Landasan manajemen Pendidikan*, Bandung, Rosdah karya.
- Hadianto, 2004, *Mencari sosok desentralisasi pendidikan, gagasan, aplikasi, dan tantangannya*, Manado, Media Pustaka.
- J.A.Denny. 1999. *Catatan politik*, Jakarta, jayabaya university press
- Mulyasa, 2003, *Kurikulum Berbasis kompetensi, Konsep, karakteristik, dan implementasi*, bandung, Rosdahkarya.
- Murhadi dan Senduk, A.G.2002, *Pembelajaran kontekstual*, Jakarta, Universitas Negeri Malang
- Proyek peningkatan tenaga akademik, dirjen Dikti Depdiknas.2002, *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila (Untuk mahasiswa)*, Jakarta.

- \_\_\_\_\_ 2002, *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (Untuk mahasiswa)*, Jakarta.
- Rosyada, Dede. 2004, *Reformasi pendidikan demokratis*, Jakarta, Prenada Media.
- Sardiman AM. 2011. *Pendidikan Karakter dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta. Makalah.
- Soemantri M Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung, Remaja Rosdah karya.
- Suryadi, Ace dan budimansyah, dasim. 2004. *Pendidikan Nasional menuju masyarakat Indoseia Baru*, Jakarta. Ganesindo.
- Sudjana, D. 2000, *Manajemen. Program Pendidikan*, Bandung: Falah Production.